

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

Dasar hukum implementasi kebijakan **kesejahteraan sosial** di Indonesia termasuk Provinsi Aceh adalah :

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1958 tentang pembangunan berbagai prasarana, sarana dan fasilitas pelayanan sosial bagi masyarakat dalam bentuk Dinas Sosial.
2. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang.
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1979 tentang Narkotika.
4. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
5. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1965 tentang Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Jompo.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan Sosial.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1980 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Cacat.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin.
10. Keputusan Presiden Nomor 48 tahun 1973 tentang Penertiban Penyelenggaraan Undian.
11. Keputusan Presiden Nomor 23 tahun 1979 tentang Badan Koordinasi Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda.

Selain itu, komitmen dan dukungan pemerintah daerah dalam kegiatan pembangunan bidang kesejahteraan sosial terutama dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial ditegaskan dalam bentuk :

1. Qanun Pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 tahun 2007 tentang Sususnan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi NAD.
2. Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial.

Sesuai Qanun Pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 tahun 2007 tentang Sususnan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Dinas Sosial Provinsi NAD adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh yang memiliki tugas melaksanakan tugas umum Pemerintahan Aceh di bidang Kesejahteraan Sosial dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
3. Bidang Program dan Pelaporan
4. Bidang Pemberdayaan Sosial
5. Bidang Bantuan Jaminan Sosial
6. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
7. Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD)
8. Kelompok Jabatan Fungsional

B. GAMBARAN UMUM DAERAH

1. Kondisi Geografis

Aceh terletak dibagian barat Indonesia yaitu dibagian paling barat gugusan kepulauan nusantara, yaitu pada posisi $01^{\circ} 58' 37,2''$ – $06^{\circ} 04' 33,6''$ lintang utara dan $94^{\circ} 57' 57,6''$ – $98^{\circ} 17' 13,2''$ bujur timur. Adapun luas wilayah Aceh $56,17 \text{ Km}^2$ dan batas wilayah aceh adalah sebagai berikut :

Sebelah utara dan timur : berbatasan dengan Selat Malaka

Sebelah selatan : berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara

Sebelah barat : berbatasan dengan Samudra Hindia

- Daerah Melingkupi : 119 Pulau, 73 Sungai
- Banyaknya Kab./Kota : 18 Kabupaten dan 5 Kota
- Banyaknya Kecamatan : 289
- Banyaknya Mukim : 779
- Desa/Gampong : 6.474

Provinsi Aceh memiliki topografi datar hingga bergunung. Wilayah dengan topografi Aceh terdiri dari 47,58% wilayahnya bergunung, 24, 63% dataran, 10,25% berbukit, 10,55% berombak dan selebihnya bergelombang. Wilayah Aceh memiliki kelerengan datar (0 - 8%) tersebar di sebagian besar sepanjang pantai utara – timur dan pantai barat – selatan seluas 2.795.650,22 Ha; dataran landai (8-15%) tersebar di antara

pegunungan Seulawah dengan sungai Krueng Aceh, di bagian tengah kabupaten/kota yang berada di wilayah barat selatan dan pantai utara – timur dengan luas 1.209.573,1 Ha; agak curam (16 - 25%) seluas 1.276.759,5 Ha hingga curam (26 – 40%) dengan luas 219.599,85 Ha tersebar di daerah tengah; dan wilayah sangat curam (> 40%) dengan total luas 175.498,3 Ha merupakan punggung pegunungan seulawah, gunung leuser dan tebing sungai.

Provinsi Aceh berdasarkan ketinggian memiliki empat level ketinggian yaitu: (1) Daerah berketinggian 0-125 m dpl, (2) Daerah berketinggian 125-1.000 m dpl, (3) Daerah berketinggian 1.000 – 2000 m dpl dan (4) daerah paling tinggi dihitung > 2.000 m dpl.

2. Gambaran Umum Demografis

Secara demografis, menurut data yang dilakukan oleh Dinas Registrasi Kependudukan Aceh adalah sebanyak 5.737.121 jiwa, dimana jumlah penduduk terbanyak adalah di Kabupaten Aceh Utara yaitu 629.780 jiwa dan jumlah penduduk terkecil adalah Kota Sabang yaitu 40.275 jiwa.

Tingkat kepadatan penduduk di Aceh bervariasi, Kota Banda Aceh yang memiliki luas hanya 56,17 km² merupakan daerah terpadat dengan kepadatan penduduk mencapai 4.586 jiwa/km², sedangkan Kabupaten Gayo Lues merupakan daerah yang terjarang penduduknya dengan kepadatan penduduk 18 jiwa/km².

3. Kondisi Ekonomi

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dimana Perekonomian Aceh pada triwulan IV tahun 2015 tumbuh meningkat pada kisaran 0,53% s.d 1,53% (yoy). Kontraksi dari sisi penawaran diperkirakan masih bersumber dari sektor pertambangan dan industri pengolahan. Sementara itu, kontraksi dari sisi permintaan berasal dari tingginya impor. Pada triwulan IV tahun 2015 inflasi Aceh berada pada level antara 2,38% - 3,58% (yoy). Rendahnya inflasi pada tahun 2015 terutama disebabkan oleh penurunan harga BBM dan faktor cuaca baik yang meningkatkan produksi pertanian & perikanan.

BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

A. VISI DAN MISI ACEH

Visi pembangunan Aceh tahun 2012-2017 adalah **“Aceh yang Bermartabat, Sejahtera, Berkeadilan dan Mandiri berlandaskan Undang-Undang Pemerintahan Aceh sebagai wujud MoU Helsinki”**. Dalam mewujudkan visi Aceh tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan Aceh sebagai berikut :

1. Memperbaiki tata kelola Pemerintahan Aceh yang amanah melalui implementasi dan penyelesaian peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA) untuk menjaga perdamaian yang abadi;
2. Menerapkan nilai-nilai budaya Aceh dan Nilai-nilai Dinul Islam disemua sektor kehidupan masyarakat;
3. Memperkuat struktur ekonomi dan kualitas sumber daya manusia;
4. Melaksanakan pembangunan Aceh yang proporsional, terintegrasi dan berkelanjutan;
5. Mewujudkan peningkatan nilai tambah produksi masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan SDA;

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH

Strategi dan arah kebijakan yang akan dicapai tahun 2012 – 2017 antara lain sebagai berikut :

1. Memperbaiki tata kelola Pemerintahan Aceh yang amanah melalui implementasi dan penyelesaian peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA) untuk menjaga perdamaian yang abadi.

Strategi :

- a) Percepatan penyelesaian dan penerapan berbagai peraturan secara transparan dan akuntabel
- b) Pelaksanaan tatakelola birokrasi yang optimal dalam pelayanan publik melalui pelayanan terpadu yang didukung teknologi
- c) Penempatan pejabat yang sesuai kompetensi dan profesionalisme
- d) Peningkatan sumber daya aparatur pemerintah
- e) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan
- f) Pembangunan kepercayaan kepada berbagai stakeholder dalam rangka keberlanjutan perdamaian yang sesuai dengan prinsip-prinsip pencegahan dan resolusi konflik serta penuntasan proses reintegrasi

Arah Kebijakan :

- a) Menyelesaikan dan menerapkan seluruh peraturan pelaksana UUPA secara transparan dan akuntabel
 - b) Melaksanakan reformasi dan tatakelola Pemerintah yang Baik dan Bersih
 - c) Menyediakan ruang dialog publik yang bebas demokratis
 - d) Melaksanakan sosialisasi tentang Keberlanjutan Perdamaian kepada masyarakat serta mendorong penuntasan kegiatan reintegrasi
2. Menerapkan nilai-nilai budaya Aceh dan Nilai-nilai Dinul Islam disemua sektor kehidupan masyarakat;

Strategi :

- a) Peningkatan pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap sejarah aceh sebagai nilai budaya dalam tatanan kehidupan
- b) Peningkatan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan ketaatan masyarakat serta aparatur pemerintah terhadap pelaksanaan nilai-nilai Dinul Islam
- c) Peningkatan peran ulama dalam setiap pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan

Arah Kebijakan :

- a) Melaksanakan sosialisai tentang pemahaman dan penghayatan terhadap budaya dan sejarah aceh
 - b) Memperbaiki kurikulum pendidikan, pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat dan aparatur pemerintah tentang penerapan dinul islam
 - c) Melibatkan ulama dalam setiap pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan
3. Memperkuat struktur ekonomi dan kualitas sumber daya manusia;

Strategi :

- a) Pengembangan agroindustri dan kepariwisataan berdasar potensi wilayah
- b) Peningkatan pertumbuhan ekonomi Aceh, PAD dan pendapatan perkapita masyarakat
- c) Pengembangan dan peningkatan keahlian tenaga kerja lokal yang kompetitif untuk menurunkan angka pengangguran terbuka dan kemiskinan
- d) Peningkatan kualitas SDM yang mendukung profesionalisme peran Badan Usaha Milik Pemerintah Aceh (BUMA) untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Aceh
- e) Peningkatan pertumbuhan investasi asing dan dalam negeri serta peran lembaga otoritas investasi
- f) Pemberdayaan ekonomi lokal masyarakat dengan penyediaan fasilitas usaha mikro dan menengah

- g) Pencapaian tujuan pembangunan milenium (MDGs) bidang pendidikan pada tahun 2015
- h) Peningkatan kualitas pendidikan berbasis keahlian dan kebutuhan pasar tenaga kerja
- i) Pencapaian tujuan pembangunan milenium (MDGs) bidang kesehatan pada tahun 2015
- j) Peningkatan pelayanan kesehatan yang profesional dan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin
- k) Penurunan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular

Arah Kebijakan :

- a) Meningkatkan produksi dan nilai tambah produk pertanian, mengembangkan agro industri, perdagangan dan pariwisata
 - b) Mendorong berkembangnya investasi swasta dan BUMA serta menyelesaikan infrastruktur pendukung ekonomi untuk daerah terpencil dan pesisir
 - c) Menyediakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha serta meningkatkan kualitas tenaga kerja
 - d) Mendorong pengembangan sektor usaha produktif dan penyertaan modal serta meningkatkan profesionalisme pengelolaan BUMA
 - e) Meningkatkan promosi investasi dan memberi kemudahan investasi serta meningkatkan peran lembaga otoritas investasi
 - f) Meningkatkan kualitas dan distribusi guru, penyediaan sarana dan prasarana
 - g) Menyediakan akses modal dan pasar bagi usaha mikro dan menengah
 - h) pendidikan yang berkualitas secara proporsional serta menerapkan bebas biaya pendidikan wajib belajar 12 tahun
 - i) Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas
 - j) Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga medis dan paramedis yang didukung sarana prasarana kesehatan yang sesuai standar
 - k) Melakukan pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit menular dan tidak menular serta sosialisasi PHBS yang didukung tenaga penyuluh kesehatan yang memadai dan berkualitas
4. Melaksanakan pembangunan Aceh yang proporsional, terintegrasi dan berkelanjutan;

Strategi :

- a) Peningkatan pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan
- b) Pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur terutama di daerah tertinggal, daerah terdepan, daerah terluar dan pasca konflik

- c) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan

Arah Kebijakan :

- a) Meningkatkan dan mengoptimalkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dasar
- b) Memelihara dan meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan, irigasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi antar wilayah
- c) Meningkatkan sosialisasi tentang adaptasi dan mitigasi bencana serta pengelolaan lingkungan

5. Mewujudkan peningkatan nilai tambah produksi masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan SDA;

Strategi :

- a) Peningkatan produksi, produktivitas dan kontinuitas produk pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan unggulan untuk mendukung ketahanan pangan dan nilai tambah produk berbasis pangsa pasar
- b) Peningkatan pendapatan masyarakat melalui intensifikasi dan ekstensifikasi areal pertanian
- c) Pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi sebagai daya saing wilayah
- d) Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap bencana dan kelestarian lingkungan
- e) Peningkatan produk unggulan lokal masyarakat yang dapat bersaing di pasar lokal dan internasional
- f) Pemanfaatan sumberdaya energi terbarukan dan tidak terbarukan secara optimal dan berkelanjutan

Arah kebijakan :

- a) Meningkatkan produksi, produktifitas, distribusi pangan serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah produksi pertanian
- b) Mengidentifikasi dan memanfaatkan lahan terlantar untuk mengembangkan kawasan pertanian berbasis komoditi unggulan daerah
- c) Menyediakan sarana dan prasarana pendukung dan kelembagaan serta SDM profesional untuk pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi
- d) Melaksanakan pelatihan dan sosialisasi tentang kelestarian lingkungan

- e) Meningkatkan ketrampilan pelaku ekonomi masyarakat dan dukungan terhadap permodalan serta akses pasar
- f) Mengidentifikasi dan memanfaatkan sumber energi terbarukan dan tidak terbarukan secara lestari

C. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2. Keberlanjutan Perdamaian
3. Dinul Islam, Adat dan Budaya
4. Ketahanan Pangan dan Nilai Tambah Produk
5. Penanggulangan Kemiskinan
6. Pendidikan
7. Kesehatan
8. Infrastruktur yang Terintegrasi
9. Sumber Daya Alam Berkelanjutan
10. Kualitas Lingkungan dan Kebencanaan

BAB III

PROFIL KELEMBAGAAN DINAS SOSIAL ACEH

A. VISI DAN MISI DINAS SOSIAL

Visi Dinas Sosial Aceh adalah; ***“Terwujudnya Masyarakat Aceh Yang Bermartabat dan Berkesejahteraan Sosial”***.

Hal ini mengandung makna bahwa sebagai salah satu unit/lembaga/instansi yang berada di bawah Pemerintah Aceh, Dinas Sosial merupakan instansi terdepan dan memegang peranan penting dalam melaksanakan kegiatan pembangunan bidang kesejahteraan sosial (pelayanan kesejahteraan sosial), terutama dalam mengatasi dan menanggulangi berbagai permasalahan sosial yang muncul dalam kehidupan masyarakat Aceh.

Visi ini juga dapat dicapai dengan tetap menjunjung nilai-nilai profesionalisme, serta menggali berbagai potensi dan sumber-sumber kesejahteraan sosial yang ada dalam rangka menjamin hak setiap warga negara Indonesia khususnya di Aceh untuk hidup sejahtera lahir dan batin dalam rangka meningkatkan kualitas hidupnya.

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi Dinas Sosial Aceh yang meliputi:

1. Meningkatkan pelayanan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) guna menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pemberdayaan sosial, pelayanan sosial dan jaminan kesejahteraan sosial.
2. Meningkatkan profesionalisme dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial, meliputi; pemberdayaan, rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial.
3. Meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, kejuangan, keberintisan dan kesetiakawanan sosial serta kemitraan dalam penyelenggaraan usaha Kesejahteraan Sosial bagi PMKS.
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
5. Membangun dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS SOSIAL

Strategi dan arah kebijakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Provinsi Aceh sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Sosial.
2. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.
3. Perlindungan dan Jaminan Sosial.
4. Penguatan Kelembagaan Sosial.
5. Perluasan Jangkauan Pelayanan.
6. Koordinasi.
7. Kemitraan.

Sasaran Pelayanan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Tahun 2014 merupakan tindak lanjut dari sasaran pelayanan tahun-tahun sebelumnya yang secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. **Perorangan**, yaitu pemberian pelayanan dan atau bantuan kepada individu yang menyanggah permasalahan sosial
2. **Keluarga**, yaitu pemberian pelayanan dan atau bantuan kepada keluarga yang menyanggah permasalahan sosial.
3. **Kelompok**, yaitu pemberian pelayanan dan atau bantuan kepada kelompok yang anggotanya terdiri dari individu-individu yang menyanggah permasalahan sosial.
4. **Masyarakat**, yaitu pemberian pelayanan dan atau bantuan kepada masyarakat yang mendiami suatu kawasan yang kehidupannya tidak layak huni, terpencil dan atau di daerah rawan bencana.
5. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (**PSKS**) yang mendukung pelayanan sosial meliputi:
 - a) Sistem nilai sosial budaya yang positif dalam tatanan kehidupan masyarakat.
 - b) Sumber daya manusia, alam, ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - c) Lembaga sosial dan organisasi sosial dalam masyarakat.
 - d) Pilar-pilar partisipasi sosial masyarakat.

Sesuai Revisi **Rencana Setrategis** (Renstra) Dinas Sosial Aceh tahun 2007 - 2012, arah kebijakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Provinsi Aceh sebagai berikut:

1. **Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial di seluruh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.**

Dalam rangka meningkatkan kebijakan ini ditempuh langkah-langkah pengembangan sebagai berikut :

- a. Peningkatan sarana dan prasarana kesejahteraan sosial agar dapat memberi jangkauan pelayanan sosial yang lebih luas.

- b. Perluasan dan peningkatan aksesibilitas PMKS terhadap pelayanan kesejahteraan sosial.
- c. Optimalisasi program-program rehabilitasi dan pemberdayaan sosial.
- d. Optimalisasi program-program penanggulangan korban bencana.

2. Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur pelaksana.

Langkah yang ditempuh dalam meningkatkan sumberdaya aparatur pelaksana diwujudkan dalam bentuk :

- a. Pengkajian aspek SDM Dinas Sosial Provinsi NAD.
- b. Penyuluhan dan pelatihan.
- c. Pengadaan sarana kerja.
- d. Peningkatan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis pekerjaan sosial.
- e. Peningkatan kesejahteraan aparatur pelaksana.

3. Memanfaatkan dan mengembangkan potensi dan sumber-sumber kesejahteraan sosial.

Berbagai langkah-langkah pengembangan yang dilakukan adalah :

- a. Pengembangan potensi dan sumber-sumber kesejahteraan sosial unggulan sesuai dengan karakteristik daerah.
- b. Peningkatan kesadaran, kesukaan dan kecintaan terhadap nilai, norma dan adat istiadat yang mengarah pada budaya kebersamaan.
- c. Optimalisasi peran lembaga-lembaga adat.

4. Penyediaan dan pemutakhiran data PMKS dan PSKS.

Langkah-langkah yang dilaksanakan untuk mendukung strategi ini antara lain :

- a. Meningkatkan kegiatan pendataan dengan menggunakan teknologi informasi secara efektif dan efisien.
- b. Optimalisasi peran kabupaten/kota dalam penyediaan data PMKS dan PSKS.
- c. Pengadaan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial dengan berbasis teknologi.
- d. Pelatihan manajemen pengelolaan data PMKS dan PSKS.

5. Peningkatan koordinasi dan kemitraan lintas sektor dan lintas wilayah.

Untuk meningkatkan strategi ini dilaksanakan langkah-langkah pengembangan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan rapat kerja dan rapat koordinasi baik secara vertikal (intern organisasi) dan horizontal (ekstern organisasi).
- b. Sosialisasi hasil koordinasi kepada masyarakat.
- c. Peningkatan bentuk kemitraan antar instansi/lembaga/organisasi lain dalam rangka penyelesaian permasalahan kesejahteraan sosial.

- d. Peningkatan komunikasi dan informasi teknologi pekerjaan sosial dengan instansi terkait kabupaten dan kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

6. Meningkatkan kapasitas lembaga dan tata kerja organisasi.

Beberapa langkah-langkah pengembangan yang diperlukan untuk strategi ini adalah :

- a. Pendidikan dan pelatihan keorganisasian/kelembagaan.
- b. Peningkatan koordinasi dan konsultasi.
- c. Pembentukan forum kerjasama.
- d. Implementasi undang-undang/peraturan/kebijakan mengenai penanganan masalah kesejahteraan sosial.

C. PRIORITAS

Program prioritas Dinas Sosial Aceh pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Penanggulangan Kemiskinan.
2. Penanggulangan Bencana.
3. Perlindungan Anak dan Keluarga
4. Rehabilitasi dan Pelayanan Kelompok Rentan (Lanjut Usia, Kecacatan dan Ketunaan)

D. SUSUNAN ORGANISASI

Sesuai Qanun Aceh Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Susunan Organisasi Dinas Sosial sebagai berikut:

- Kepala Dinas
- Sekretariat
- Bidang Program dan Pelaporan
- Bidang Pemberdayaan Sosial
- Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial
- Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
- Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- Kelompok Jabatan Fungsional

Dengan bagian, tugas dan fungsi masing-masing jabatan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Sosial berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui SEKDA. Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas melakukan tugas umum pemerintahan di bidang pemberdayaan sosial, bantuan dan jaminan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretariat

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas Sosial di bidang pelayanan Administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana dan keuangan serta berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat, terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum
- b. Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana
- c. Sub Bagian Keuangan

3. Bidang Program dan Pelaporan

Bidang Program dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan kegiatan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang, penelitian, pengkajian, pengembangan, data, informasi, penyuluhan sosial, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelaksanaan kesejahteraan sosial. Bidang Program dan Pelaporan terdiri dari:

- a. Seksi Data dan Informasi
- b. Seksi Penyusunan Program
- c. Seksi Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan

4. Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas pelaksanaan pelayanan pemberdayaan sosial masyarakat, pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi dengan instansi lembaga terkait terhadap permasalahan sosial keluarga, fakir miskin, komunitas adat terpencil, wanita rawan sosial, karang taruna, organisasi sosial, tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, pembinaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, pemeliharaan dan pemugaran makam syuhada tsunami dan nilai-nilai kesetiakawanan sosial. Bidang Pemberdayaan Sosial terdiri dari:

- a. Seksi Pemberdayaan Sosial Masyarakat
- b. Seksi Pemberdayaan Organisasi Sosial dan Kemitraan
- c. Seksi Pembinaan Kepahlawanan dan Kejuangan

5. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial

Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas pemberian pelayanan, bantuan sosial serta pengendalian dan pengorganisasian masyarakat dalam penanggulangan bencana, kepada korban bencana alam, korban bencana sosial, korban konflik, korban terdampar, atau terlantar, dan masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana. Selain itu juga melakukan pengumpulan dan pengelolaan sumber dana sosial dari swasta dan masyarakat, terdiri dari:

- a. Seksi Penanggulangan Bencana
- b. Seksi Pengumpulan Sumbangan Sosial
- c. Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial

6. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial melaksanakan pemberian pelayanan dan rehabilitasi sosial kepada penyandang cacat, tuna sosial, korban penyalahgunaan narkoba dan zat adaktif, penderita AIDS, anak dan lanjut usia terlantar baik panti maupun luar panti. Bidang Pelayanan dan Jaminan Sosial terdiri dari:

- a. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat
- b. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial
- c. Seksi Pelayanan Anak dan Lanjut Usia

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Aceh, terbentuk melalui Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 29 Tahun 2009, terdiri dari:

- a. UPTD Rumoh Seujahtera Beujroh Meukarya, di bidang administrasi, rehabilitasi, pembinaan dan pelayanan penyandang tuna sosial dan penyandang cacat.
- b. UPTD Rumoh Sejahtera Jroh Naguna, di bidang Administrasi, rehabilitasi, pembinaan, pelayanan dan penyantunan anak yatim, piatu, yatim piatu korban bencana serta pelayanan terhadap anak/remaja putus sekolah melalui peningkatan keterampilan.
- c. UPTD Rumoh Seujahtera Geunaseh Sayang, di bidang administrasi, pelayanan, penyantunan dan pembinaan bagi lanjut usia terlantar dan memiliki permasalahan sosial.
- d. UPTD Rumoh Seujahtera Aneuk Nanggroe, di kegiatan teknis penunjang di bidang penyantunan, pelayanan, pembinaan dan rehabilitasi terhadap anak jalanan dan anak korban tindak kekerasan.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional Dinas Sosial Aceh, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya dan jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

E. Kondisi Umum Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah Pegawai dan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Dinas Sosial Provinsi Aceh sampai dengan Desember 2015 sebagai berikut:

RINCIAN	URAIAN	JUMLAH PNS
PENDIDIKAN	S-2	28
	S-1	76
	Sarjana Muda	8
	S M A	80
	S M P	3
	S D	2
J u m l a h		197
GOLONGAN	Golongan Ruang I/a	2
	Golongan Ruang I/c	2
	Golongan Ruang II/a	27
	Golongan Ruang II/b	9
	Golongan Ruang II/c	12
	Golongan Ruang II/d	3
	Golongan Ruang III/a	18
	Golongan Ruang III/b	45
	Golongan Ruang III/c	26
	Golongan Ruang III/d	42
	Golongan Ruang IV/a	9
	Golongan Ruang IV/b	1
	Golongan Ruang IV/c	1
J u m l a h		197
ESELON	Esselon II.a	1
	Esselon III.a	9
	Esselon IV.a	27
	Fungsional Arsiparis	2
	Staff	158
J u m l a h		197

BAB IV
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

DINAS SOSIAL ACEH

1. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang diterima Dinas Sosial Aceh meliputi :

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	ANGGARAN (Rp.)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
01	02	03	04	05	06
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG (Gaji, TPK, dan Honor)				
-	URUSAN WAJIB SOSIAL	17.991.447.227	17.237.076.545	95,79	100,00
-	DINAS SOSIAL ACEH	17.991.447.227	17.237.076.545	95,81	100,00
B	BELANJA LANGSUNG				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.848.751.500	3.187.235.976	82,81	84,09
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.487.500	13.467.000	99,85	100,00
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	591.000.000	475.979.060	80,54	90,00
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	72.600.000	32.097.600	44,21	60,00
-	Penyedia Jasa Kebersihan	180.000.000	178.065.000	98,93	100,00
-	Penyediaan Alat Tulis Kantor	100.131.500	84.755.000	84,64	90,00
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	84.800.000	55.586.850	65,55	70,00
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27.545.000	16.646.000	60,43	75,00
-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	21.768.000	21.768.000	100,00	100,00
-	Penyediaan Makanan dan Minuman	89.500.000	53.249.500	59,50	65,00
-	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	582.120.000	438.744.246	75,37	80,00
-	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.085.800.000	1.816.877.720	87,11	95,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	12.987.850.200	12.360.392.558	95,17	98,00
-	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.556.000.000	1.465.073.625	94,16	100,00
-	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	381.675.000	377.815.300	98,99	100,00
-	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	133.940.000	121.470.000	90,69	100,00

-	Pengadaan Mebeleur	5.836.263.200	5.773.106.700	98,92	100,00
-	Pengadaan Komputer	3.626.614.000	3.355.397.000	92,52	100,00
-	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	200.000.000	166.700.000	83,35	100,00
-	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	953.058.000	871.428.047	91,43	100,00
-	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	154.000.000	101.269.686	65,76	70,00
-	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	22.500.000	21.000.000	93,33	100,00
-	Pemeliharaan Rutin/Berkala Dokumen dan Buku Bacaan Kantor	10.800.000	-	-	-
-	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sound System	18.000.000	13.535.000	75,19	100,00
-	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	25.000.000	24.670.000	98,68	100,00
-	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	70.000.000	68.927.200	98,47	100,00
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	368.600.000	290.985.200	78,94	80,00
-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	300.200.000	256.075.800	85,30	95,00
-	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	68.400.000	34.909.400	51,04	65,00
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	748.696.600	613.613.750	81,96	86,17
-	Pendidikan dan Pelatihan Formal	92.100.000	25.089.600	27,24	40,00
-	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	82.800.000	71.109.750	85,88	90,00
-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	21.134.000	20.684.000	97,87	100,00
-	Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	11.000.000	11.000.000	100,00	100,00
-	Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis)	319.762.600	301.436.400	94,27	97,00
-	Peningkatan Kegiatan Keagamaan	221.900.000	184.294.000	83,05	90,00
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	13.164.000	13.164.000	100,00	100,00
-	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.164.000	13.164.000	100,00	100,00
6	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Pemberdayaan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	43.424.838.100	41.697.450.265	96,02	97,78
-	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT, dan PMKS	213.704.000	144.658.000	67,69	85,00

-	Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin	8.500.494.000	8.097.184.785	95,26	100,00
-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Usaha Bagi Keluarga Miskin	12.530.096.000	11.628.892.730	92,81	100,00
-	Pelatihan Ketrampilan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	640.600.000	613.506.000	95,77	100,00
-	Pemberdayaan Keterampilan Berusaha Komunitas Adat Terpencil	823.422.000	741.177.200	90,01	95,00
-	Pelatihan Ketrampilan Bagi Lansia	4.720.467.000	4.662.179.250	98,77	100,00
-	Pelatihan Ketrampilan Bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	4.569.767.000	4.541.944.400	99,39	100,00
-	Pemberdayaan Ketrampilan Bagi Keluarga Rentan	5.814.697.500	5.848.636.300	100,58	100,00
-	Pembinaan dan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	5.611.590.600	5.419.271.600	96,57	100,00
7	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	146.442.811.973	139.202.889.384	95,06	97,50
-	Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	24.072.978.200	24.085.628.301	100,05	100,00
-	Pelayanan Psikososial bagi PMKS di Trauma Centre termasuk bagi Korban Bencana	269.450.000	226.310.037	83,99	90,00
-	Penyusunan Kebijakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	468.180.000	377.048.499	80,53	85,00
-	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya- Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan	173.409.600	170.860.600	98,53	100,00
-	Penanganan Masalah-masalah Strategis yang menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	39.503.382.623	37.807.848.449	95,71	100,00
-	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	311.274.800	271.533.350	87,23	100,00
-	Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial Bagi Korban Tindak Kekerasan (KTK)	919.939.000	911.546.350	99,09	100,00
-	Pendayagunaan Sumber Dana Sosial	293.010.000	287.810.850	98,23	100,00
-	Sosialisasi Bahaya Narkotika Berbasis Masyarakat	417.283.000	415.291.000	99,52	100,00
-	Pelatihan Ketrampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Nakal Korban Narkotika	294.980.000	255.460.600	86,60	95,00
-	Pelatihan dan pembinaan Anak Jalanan, Anak Terlantar, Anak Cacat Korban Bencana	2.177.000.000	2.067.546.050	94,97	100,00
-	Pemberdayaan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat	8.267.312.900	7.556.106.150	91,40	95,00
-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi Panti	13.391.747.700	13.346.955.950	99,67	100,00
-	Pemulangan Orang Terlantar/Terdampar	2.241.305.000	2.221.686.000	99,12	100,00

-	Pemberdayaan dan Korban Bencana Sosial Daerah Konflik (Reintegrasi)	49.318.123.750	44.907.686.798	91,06	95,00
-	Pelayanan dan Perlindungan Sosial Bagi Lanjut Usia Terlantar	4.323.435.400	4.293.428.400	99,31	100,00
8	Program Pembinaan Anak terlantar	22.834.198.700	22.639.068.605	98,97	100,00
-	Pengembangan Bakat dan Keterampilan Anak Terlantar	2.790.431.500	2.709.123.200	97,09	100,00
-	Peningkatan Keterampilan Tenaga Pembinaan Anak Terlantar	295.300.000	232.890.000	78,87	100,00
-	Advokasi dan Perlindungan Anak Terlantar	1.664.190.000	1.463.385.280	87,93	100,00
-	Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak	18.084.277.200	18.193.870.125	100,61	100,00
9	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Trauma	3.865.472.300	3.491.397.900	90,32	97,50
-	Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks. Trauma	3.578.462.300	3.214.540.900	89,83	95,00
-	Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat Eks. Psikotik	287.010.000	276.857.000	96,46	100,00
10	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	26.042.223.000	20.567.532.433	78,98	85,00
-	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/Jompo	3.436.160.000	3.139.343.123	91,36	95,00
-	Pendidikan dan Pelatihan Cacat Netra	1.247.950.000	810.963.000	64,98	70,00
-	Peningkatan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/Jompo	4.672.200.000	1.000.378.200	21,41	25,00
-	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Remaja Putus Sekolah	2.626.098.000	2.591.361.500	98,96	100,00
-	Operasi dan Pemeliharaan Sarana Panti Bina Remaja	3.306.720.000	3.095.790.791	93,62	100,00
-	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Anak Jalanan	5.341.125.000	5.213.072.790	97,60	100,00
-	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Cacat/Panti Karya	3.713.543.000	3.057.148.929	82,32	90,00
-	Pembinaan dan Pelayanan Lansia Dalam Panti Jompo	1.698.427.000	1.659.474.100	97,71	100,00
11	Program Pembinaan Eks. Penyandang Penyakit Sosial (Eks. Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	2.792.697.000	2.363.613.842	84,64	93,75
-	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Berusaha bagi Eks. Penyandang Penyakit Sosial	985.090.000	612.624.800	62,19	75,00
-	Pemberdayaan Penyandang Penyakit Sosial	904.114.000	864.455.392	95,61	100,00
-	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Berusaha bagi Gelandangan dan Pengemis	502.320.000	486.776.350	96,91	100,00
-	Pembinaan dan Pemberdayaan Penyandang HIV/Aids	401.173.000	399.757.300	99,65	100,00

12	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	38.146.829.000	36.870.518.850	96,65	97,88
-	Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat	171.590.000	162.778.000	94,86	100,00
-	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	6.521.060.000	6.414.796.700	98,37	100,00
-	Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Masyarakat	2.389.580.000	2.254.606.200	94,35	98,00
-	Kerjasama Usaha Antara Pemda dengan Organisasi/Lembaga Sosial Masyarakat	32.136.000	32.099.900	99,89	100,00
-	Pelatihan Ketrampilan Taruna Penanggulangan Bencana (TAGANA)	10.984.566.000	10.479.905.050	95,41	100,00
-	Pemberdayaan Karang Taruna	13.122.560.000	13.052.157.600	99,46	100,00
-	Pelatihan Petugas Penyuluhan Sosial dan Penyuluhan Sosial Keliling	1.127.092.000	805.572.200	71,47	85,00
-	Pembinaan Organisasi Sosial dan Kemitraan	3.798.245.000	3.668.603.200	96,59	100,00
	J U M L A H	319.507.579.600	299.122.862.266	94,05	97,00

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada Tahun 2015 Pemerintah Aceh melalui Dinas Sosial Aceh telah melaksanakan 12 (dua belas) program utama dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan sosial di Aceh yang dijabarkan dibawah ini :

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Adapun kegiatan yang direalisasikan, meliputi terlaksananya sosialisasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Bireuen dan Aceh Jaya dengan masing-masing peserta sebanyak 30 orang; terlaksananya Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) berupa pertemuan dalam rangka pembangunan dibidang kesejahteraan sosial kerjasama antara Dinas Sosial Provinsi Aceh dengan Balai Besar Pendidikan Dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Padang dengan peserta berasal dari instansi sosial di 23 kabupaten/Kota yang ada di Aceh sebanyak 92 orang.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan, Adapun kegiatan yang direalisasikan, meliputi Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kerja SKPD, Penyusunan laporan keuangan semesteran dan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Pemberdayaan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Adapun kegiatan yang

direalisasikan, meliputi terlaksananya kegiatan peningkatan kemampuan bagi petugas dan pendamping sosial melalui pelatihan di Banda Aceh dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang yang berasal dari Aceh Besar, Aceh Tengah, Simeuleu, Aceh Singkil, Aceh Barat dan Aceh Timur; terlaksananya peningkatan taraf kesejahteraan keluarga miskin melalui kegiatan pelatihan ketrampilan berusaha dan pemberian bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebanyak 143 KUBE (858 KK) di 8 kabupaten/kota dimana satu KUBE terdiri dari 6 orang, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1
Penerima Bantuan KUBE Keluarga Miskin

NO	KABUPATEN/KOTA	JENIS KUBE - FM				JUMLAH
		Pertanian	Home Industri	Perikanan	Peternakan	
1	Aceh Besar	6 KUBE	8 KUBE	6 KUBE		20 KUBE
2	Banda Aceh		8 KUBE	7 KUBE		15 KUBE
3	Aceh Barat	6 KUBE	8 KUBE	6 KUBE		20 KUBE
4	Simeuleu	6 KUBE		6 KUBE	4 KUBE	16 KUBE
5	Aceh Singkil	8 KUBE		8 KUBE		16 KUBE
6	Aceh Tengah	6 KUBE	8 KUBE	6 KUBE		20 KUBE
7	Aceh Timur	8 KUBE		8 KUBE		16 KUBE
8	Aceh Utara	6 KUBE	8 KUBE	6 KUBE		20 KUBE
JUMLAH		46 KUBE	40 KUBE	53 KUBE	4 KUBE	143 KUBE

Peningkatan taraf kesejahteraan sosial keluarga miskin dengan penyediaan sarana dan prasarana melalui bimbingan teknis dengan peserta sebanyak 177 orang dan pemberian bantuan rehab Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 736 unit dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2
Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH BANTUAN	
1	Aceh Tamiang	22	Unit
2	Aceh Utara	46	Unit

3	Lhokseumawe	30	Unit
4	Bireuen	500	Unit
5	Aceh Besar	40	Unit
6	Aceh Barat	40	Unit
7	Subulussalam	58	Unit
JUMLAH		736	Unit

Terlaksananya peningkatan ketrampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) berupa pelatihan bimbingan motivasi dan ketrampilan berusaha bagi pekerja migran bermasalah sebanyak 60 orang dari Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Barat yang dilaksanakan di Banda Aceh dan pemberian bantuan usaha ekonomi produktif dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3
Bantuan Bagi PMKS (Pekerja Migran)

NO	KAB/KOTA	JENIS BANTUAN					Jumlah Penerima
		Jualan Kios	Menjahit	Pertanian	Peralatan Tukang	Membuat Kue	
1	Aceh Tamiang	22	1	-	1	6	30
2	Aceh Barat	22	-	3	3	2	30
JUMLAH		44	1	3	4	8	60

Peningkatan taraf kesejahteraan sosial warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) berupa pemberian bantuan usaha melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Barat dimana satu KUBE terdiri dari 6 orang dan Aceh Barat Daya satu KUBE terdiri dari 10 orang, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4
Bantuan KUBE Komunitas Adat Terpencil (KAT)

NO	KABUPATEN/KOTA	JENIS KUBE - KAT				JUMLAH
		Ternak Sapi	Pertanian Padi	Ternak Bebek	Palawija Kacang Tanah	

1	Aceh Jaya	7 KUBE				7 KUBE
2	Aceh Barat		1 KUBE	3 KUBE	3 KUBE	7 KUBE
3	Aceh Barat Daya	10 KUBE				10 KUBE
JUMLAH		17 KUBE	1 KUBE	3 KUBE	3 KUBE	24 KUBE

Peningkatan kemandirian lansia melalui pembinaan dan bimbingan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Lanjut Usia (Lansia) di Banda Aceh, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Jaya, Aceh Besar, Lhokseumawe, Aceh Utara dengan jumlah peserta masing-masing kabupaten/kota sebanyak 40 orang dan Sabang dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang dan pemberian paket Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5
Bantuan UEP Bagi Lansia

NO	KABUPATEN/KOTA	JENIS BANTUAN	JUMLAH
1	Banda Aceh	- Jualan Kios, Jualan Nasi, Jualan Ikan, Ternak Kambing, Ternak ayam dan Membuat Kue	40 Orang
2	Pidie	- Ternak kambing	40 Orang
3	Pidie Jaya	- Ternak kambing	40 Orang
4	Aceh Jaya	- Jualan Kios, Membuat kue, Usaha Palawija Kacang Tanah/ Cabe	40 Orang
5	Aceh Besar	- Ternak Kambing, Ternak ayam, Ternak Bebek, Jualan Kios, Jualan Mie, Jual Bibit	40 Orang

		Tanaman	
6	Lhokseumawe	- Membuat Kue, Jualan Kios dan Menjahit	40 Orang
7	Aceh Utara	- Ternak Kambing Dan Usaha Kios	40 Orang
8	Sabang	- Membuat Kue, Usaha Kios, Jualan Mie Bakso Jualan Nasi/Lontong dan Ternak Ayam	30 Orang
JUMLAH			310 Orang

dan pengadaan bantuan selimut, kain batik panjang, mukena dan kain sarung bagi lanjut usia (lansia).

Terlatih dan terberdayanya para Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) melalui pelatihan/bimbingan ketrampilan tentang manajemen usaha dan pemasaran produk yang dilaksanakan pada 6 kabupaten/kota di provinsi Aceh sebanyak 500 orang, dan selanjutnya diberikan bantuan berupa paket Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6
Bantuan UEP Bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)

NO	KAB/KOTA	JENIS BANTUAN			Jumlah Penerima
		Jualan Kios	Jualan Nasi	Menjahit	
1	Pidie Jaya	30	25	25	80 orang
2	Lhokseumawe	30	25	30	85 orang
3	Aceh Timur	30	25	25	80 orang
4	Aceh Tamiang	25	30	25	80 orang
5	Bireuen	30	25	30	85 orang
6	Langsa	30	30	30	90 orang
JUMLAH		175	160	165	500 orang

Peningkatan taraf kesejahteraan sosial keluarga rentan melalui pemenuhan kebutuhan dasar bagi keluarganya berupa pelatihan pemberdayaan bagi keluarga rentan dan pemberian bantuan dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 7
Bantuan Bagi Keluarga Rentan

NO	KABUPATEN/KOTA	JENIS USAHA			JUMLAH	JUMLAH/ KECAMATAN
		Menjahit	Produksi/ JualanKue	Jualan Nasi		
1	Aceh Jaya	30 KK	40 KK	30 KK	100 KK	3 Kec
2	Aceh Barat	30 KK	40 KK	30 KK	100 KK	3 Kec
3	Nagan Raya	20 KK	25 KK	30 KK	75 KK	2 Kec
4	Pidie	30 KK	40 KK	30 KK	100 KK	2 Kec
5	Subulussalam	30 KK	30 KK	30 KK	90 KK	3 Kec
JUMLAH		140 KK	175 KK	150 KK	465 KK	

Serta pemberian bantuan pemberdayaan bagi keluarga rentan melalui dana aspirasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8
Bantuan Bagi Keluarga Rentan

NO	KABUPATEN/KOTA	JENIS USAHA					
		Menjahit	Ternak Kambing	Ternak Ayam Kampung	Bebek	Becak	Jualan Kios
1	Aceh Timur	67 KK					
2	Langsa	40 KK					
3	Aceh Tamiang	40 KK					
4	Gayo Lues	40 KK	40 KK				
5	Aceh Tenggara			40 KK			
6	Pidie Jaya				20 KK		
7	Aceh Barat					5 KLP	
8	Aceh Jaya	3 KK					17 KK
JUMLAH		190 KK	40 KK	40 KK	20 KK	5 KLP	17 KK

Dan terlaksananya Pembinaan dan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial (PNK3) berupa sosialisasi bagi pelajar di Nagan Raya dan Pidie masing-masing kabupaten sebanyak 200 peserta dan sosialisasi bagi guru di Pidie Jaya dan Aceh Utara masing-masing kabupaten sebanyak 120 orang.

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, Adapun kegiatan yang direalisasikan, meliputi terkoordinasinya pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Aceh sehingga meningkatnya pemahaman dan koordinasi PKH Aceh melalui rapat koordinasi teknis pendamping dan operator Program Keluarga Harapan (PKH) dengan peserta sebanyak 226 orang berasal dari kabupaten/kota yang dilaksanakan di Banda Aceh, pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9
Bantuan UEP Program Keluarga Harapan (PKH)

NO	JENIS BANTUAN	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH
1	2	3	4
1	Bebek	- Aceh Tenggara, Gayo Lues, Pidie, Aceh Jaya, Aceh Tamiang	40 Orang
2	Kambing	- Aceh Utara, Bireuen, Bener meriah, Nagan Raya	40 Orang
3	Jualan Kios	- Aceh Besar	40 Orang
JUMLAH			120 Orang

serta pemberian bantuan dalam bentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dapat dilihat pada tabel berikut :

Terlaksananya pelayanan psikososial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di trauma center bagi korban bencana melalui pelatihan yang diikuti 40 peserta yang dilaksanakan di Banda Aceh;

Terlaksananya Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi berupa Kegiatan Koordinasi Pencapaian Target SPM Bidang Sosial yang dilaksanakan di Aula Dinas Sosial dengan peserta sebanyak 23 orang; tersedianya dan tersalurkannya bantuan untuk korban bencana secara cepat dan tepat sasaran melalui pelatihan pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB) di Pidie, Pidie Jaya, Bireuen dan Langsa dengan jumlah peserta masing-masing kabupaten/kota sebanyak 60 orang serta pemberian bantuan berupa pengadaan bufferstock untuk korban bencana alam/sosial; terlaksananya sosialisasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bagi korban tindak kekerasan melalui pelatihan ketrampilan praktek jualan kios dan membuat kue serta bimbingan motivasi kepada Korban Tindak Kekerasan di Aceh Jaya dan Aceh Singkil dengan peserta masing-masing kabupaten sebanyak 20 orang dan pemberian bantuan Aneka Usaha Ekonomi Produktif (UEP) terlihat pada tabel berikut :

Tabel 11
Bantuan UEP Bagi Korban Tindak Kekerasan (KTK)

NO	KAB/KOTA	JENIS BANTUAN				Jumlah Penerima
		Jualan Kios	Jualan Kue	Menjahit	Perabot	

1	Aceh Jaya	-	18	2	-	20
2	Aceh Singkil	19	1	-	-	20
3	Pidie	12	16	22	-	40
4	Lhokseumawe	11	23	6	-	40
5	Aceh Barat	25	8	6	1	40
	JUMLAH	67	66	36	1	160

Terlaksananya sosialisasi undian gratis hadiah (UGB) dan pengumpulan uang atau barang (PUB) di Lhokseumawe dan Sabang masing-masing sebanyak 35 orang yang berasal dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota, Mahasiswa, TKSK, Perusahaan/Bank, Orsos, Tokoh Masyarakat dan Ibu PKK, sosialisasi di Banda Aceh sebanyak 50 orang berasal dari mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Aceh dan sosialisasi melalui radio di Banda Aceh;

Terlaksananya Penyuluhan tentang Bahaya Narkotika di Kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten Aceh Barat Daya dengan peserta masing-masing kabupaten sebanyak 60 orang yang berasal dari unsur pemuda dan remaja, sosialisasi di Provinsi dalam rangka HANI yang diikuti sebanyak 200 orang yang berasal dari unsur pemuda, siswa dan LSM dan sosialisai anti narkoba di radio; terlaksananya pelayanan sosial bagi anak nakal korban narkotika berupa pelatihan ketrampilan pertukangan dan Praktek Belajar Kerja (PBK) di Aceh Tengah dan Langsa dengan jumlah peserta masing-masing kabupaten/kota sebanyak 22 orang serta pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 12
Bantuan UEP Bagi Anak Nakal Korban Narkotika

NO	KABUPATEN/KOTA	JENIS BANTUAN			Jumlah Penerima
		Jualan Kios	Doorsmir	Jualan Minyak Bensin	
1	Aceh Tamiang	18	12	8	38

	JUMLAH	18	12	8	38 orang
--	--------	----	----	---	----------

Terselenggaranya pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial bagi Anak Jalanan, Anak Terlantar, Anak Cacat Korban Bencana berupa kegiatan pengasuhan anak terlantar melalui Rumah Sejahtera Aneuk Nanggroe, khususnya bagi SOSH 81 anak selama setahun dimana 52 anak dalam panti dan 29 anak diluar panti; Pemberdayaan para Penyandang Cacat melalui bimbingan berupa pelatihan refleksi di provinsi yang diikuti sebanyak 18 orang serta pemberian bantuan alat pijat refleksi dan pelatihan akupresur yang diikuti sebanyak 18 orang serta pemberian bantuan alat akupresur. Pelatihan melalui Loka Bina Karya (LBK) di Aceh Tengah, Pidie dan Bireuen dengan jumlah peserta masing-masing kabupaten sebanyak 15 orang dan pemberian bantuan berupa menjahit serta di Simelue diberikan bantuan berupa perbengkelan. Kegiatan Bimbingan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Aceh Utara, Pidie Jaya, Subulussalam dan Provinsi dengan jumlah peserta masing-masing kabupaten/kota sebanyak 30 orang dan selanjutnya mereka diberikan bantuan UEP dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 13
Bantuan UEP Penyandang Cacat

NO	KABUPATEN/KOTA	JENIS BANTUAN	JUMLAH
1	Aceh Utara	- Jualan Dikios	30 Orang
2	Pidie Jaya	- Jualan Dikios	19 Orang
		- Reparasi Elektronik	4 Orang
		- Usaha Pangkas Rambut	2 Orang
		- Perbengkelan	3 Orang
		- Pertanian semangka	1 Orang
		- Menjahit	1 Orang
3	Subulussalam	- Jualan Dikios	30 Orang
4	Provinsi	- Jualan Dikios	14 Orang
		- Membuat Kue	7 Orang
		- Reparasi Elektronik	2 Orang
		- Perbengkelan	7 Orang
JUMLAH			120 Orang

--	--

Kegiatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) yang dilaksanakan di provinsi dengan pemberian bantuan berupa perlengkapan ibadah bagi penyandang disabilitas sebanyak 200 orang. Kegiatan rapat koordinasi peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas sebanyak dua angkatan masing-masing angkatan 20 orang, bantuan Asistensi Orang Dengan Kecacatan Berat (ODKB) dalam bentuk uang sebesar Rp. 250.000,- perbulan selama empat bulan dan satu tahun di kabupaten/kota di Provinsi Aceh sebanyak 604 orang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 14
Bantuan Asistensi Orang Dengan Kecacatan Berat (ODKB)

NO	KABUPATEN/KOTA	4 BULAN	12 BULAN	JUMLAH
1	Aceh Tamiang	30	31	61 orang
2	Lhokseumawe	-	31	31 orang
3	Pidie	11	31	42 orang
4	Aceh Besar	63	39	102 orang
5	Subulussalam	-	19	19 orang
6	Bireuen	20	35	55 orang
7	Pidie Jaya	38	-	38 orang
8	Banda Aceh	2	-	2 orang
9	Aceh Jaya	4	-	4 orang
10	Aceh Barat	39	-	39 orang
11	Bener Meriah	20	-	20 orang
12	Aceh Barat Daya	41	-	41 orang
13	Sabang	5	-	5 orang
14	Langsa	19	-	19 orang
15	Aceh Utara	52	-	52 orang
16	Nagan Raya	23	-	23 orang
17	Aceh Timur	33	-	33 orang
18	Gayo Lues	18	-	18 orang
	JUMLAH	418	186	604 orang

Pemberian bantuan kelengkapan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di kabupaten/kota di Provinsi Aceh sebanyak 505 orang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 15
Bantuan Kelengkapan UEP Penyandang Cacat

NO	KAB./KOTA	JENIS BANTUAN							Jumlah Penerima
		Pertanian Cabe	Menjahit	Jualan Dikios	Ternak Ayam	Ternak Kambing	Membuat Kue	Perbengkelan	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
1	Aceh Tengah	10	5	20	-	-	-	-	35
2	Langsa	-	-	35	-	-	-	-	35
3	Aceh Timur	-	-	35	-	-	-	-	35
4	Bener Meriah	35	-	-	-	-	-	-	35
5	Aceh Besar	-	4	9	6	16	-	-	35
6	Sabang	20	-	-	-	-	10	-	30
7	Aceh Jaya	-	-	35	-	-	-	-	35
8	Aceh Barat	-	-	35	-	-	-	-	35
9	Nagan Raya	22	-	13	-	-	-	-	35
10	Aceh Singkil	-	-	35	-	-	-	-	35
11	Aceh Tamiang	-	-	35	-	-	-	-	35
12	Aceh Barat Daya	-	-	35	-	-	-	-	35
13	Banda Aceh	-	-	18	-	-	-	2	20
14	Aceh Selatan	-	6	32	-	-	-	-	38
15	Pidie	8	5	19	-	-	-	-	32
	JUMLAH	95	20	356	6	16	10	2	505

Pemberian bantuan motor modifikasi di provinsi sebanyak 8 orang, pemberian bantuan alat musik untuk tuna netra untuk satu kelompok di Aceh Barat Daya, bantuan becak motor modifikasi di Bireuen untuk 4 orang, bantuan kendaraan roda tiga di Aceh Timur untuk 1 orang, bantuan becak motor modifikasi di Aceh Utara untuk 1 orang serta pemberian bantuan kursi roda, kaki dan tangan palsu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 16
Bantuan Kursi Roda, Kaki Dan Tangan Palsu
Penyandang Cacat

NO	KABUPATEN/KOTA	JENIS BANTUAN	JUMLAH
01	02	03	04
1	Provinsi	- Kursi Roda Cerebral Palsy	35 orang
2	Pidie dan Pidie Jaya	- Kursi Roda	76 orang
3	Provinsi	- Kursi Roda	100 orang
4	Aceh Singkil	- Kursi Roda	112 orang
5	Aceh Selatan	- Kursi Roda	113 orang
6	Subulussalam	- Kursi Roda	112 orang
7	Aceh Barat Daya	- Kursi Roda	113 orang
8	Provinsi	- Kaki dan Tangan Palsu	20 orang
JUMLAH			681 Orang

Terlaksananya Pemulangan Orang Terlantar/Terdampar berupa transport dan uang harian bagi orang terlantar dalam daerah sebanyak 322 orang dan luar provinsi sebanyak 34 orang;

Dan terlaksananya pelayanan dan perlindungan bagi lanjut usia terlantar melalui pemberian kursi roda bagi lansia di provinsi, pemberian bantuan penambahan gizi sebanyak 800 orang bagi lansia di Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Tengah dan Bener Meriah berupa gula pasir, kacang hijau, agar-agar, roti kaleng dan susu kental manis. Pemberian bantuan kelengkapan lansia terlantar berupa kain sarung, sajadah mukena dan baju koko di Aceh Besar, Banda Aceh, Pidie Jaya, Lhokseumawe, Aceh Utara, Pidie, Aceh Barat, Subulussalam dan Aceh Jaya. Serta pemberian Asuransi Lanjut Usia (ASLUT) dalam bentuk uang sebesar Rp. 250.000,- per bulan selama 1 Tahun sebanyak 200 lansia dikabupaten/kota yaitu

Banda Aceh, Pidie Jaya, Lhokseumawe, Aceh Utara, Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Jaya dan Aceh Barat.

Program Pembinaan Anak Terlantar, Adapun kegiatan yang direalisasikan, meliputi peningkatan kebutuhan dasar anak dalam panti melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya berupa kegiatan pelatihan dan pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi panti di 4 kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 17
Bantuan UEP Bagi Panti

NO	KABUPATEN/KOTA /NAMA PANTI	JENIS BANTUAN
1	Aceh Besar	
	- Yayasan PA. Ash-Shilah Maryam Binti Ibrahim	- Peternakan Kambing
	- Yayasan Nurul Hikmah	- Budidaya Ikan Air Tawar
	- Yayasan Ar-Rabwah An-Najiyah	- Peternakan Kambing
	- PA. Rumah Singgah Binaan Bumi Moro	- Peternakan Itik
2	Pidie Jaya	
	- Yayasan Raudhatul Jannah Al Malasyi	- Peternakan Sapi
	- Yayasan Pendidikan Islam Ummul Ayman II	- Peternakan Kambing
	- Yayasan PA. Bustanul Aitam	- Peternakan Kambing
	- PA. Yayasan Al-Kirani	- Kios
3	Aceh Utara	
	- Panti Asuhan Yayasan Darul Qira'ah	- Peternakan Itik
	- Yayasan PA. Miftahul Jannah	- Kios
	- Yayasan PA. Nurul Islam	- Kios
	- Yayasan PA. Miftahul Ulum	- Kios
4	Lhokseumawe	
	- Yayasan PA. Diniyah Islamiah Al- Hidayah	- Kerupuk Tempe
	- Yayasan PA. Raudhatul Fata	- Kios
	- Yayasan PA. Raudhatul Muta'alimin	- Kios
	- Yayasan PA. Darul Faizin	- Pertanian Pepaya

Pemberian alat permainan balok susun di Aceh Timur, Langsa, Banda Aceh, Aceh Jaya, Aceh Tengah, Aceh Tamiang, Bireuen dan Aceh Barat, serta pemberian perlengkapan peralatan sekolah untuk anak di Gayo Lues, kelengkapan ibadah anak dalam panti di Pidie Jaya, Bireuen dan aceh Timur

Terlaksananya Advokasi dan Perlindungan untuk Anak berupa pendampingan anak yang bermasalah dengan hukum sebanyak 161 anak pada Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Aneuk Meutuah; dan terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar anak dalam panti berupa permakanan perpanti sebanyak 6.000 anak di kabupaten/kota di provinsi aceh, bantuan alat peraga/Permainan BTQ untuk Aceh Besar, Aceh Utara, Lhokseumawe, Subulussalam dan Aceh Tamiang, bantuan sarana kebutuhan anak dalam panti di Aceh Tenggara, Aceh Utara, Aceh Selatan, Lhokseumawe dan Bireuen, bantuan kelengkapan peralatan sekolah sebanyak 2.480 anak dikabupaten/kota di provinsi aceh, bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) berupa budi daya ikan, jualan kelontong, menjahit dan bordir, bantuan kelengkapan sekolah untuk anak TK, SD, SMP dan SMA sebanyak 1.585 anak di kabupaten/kota di provinsi aceh.

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Trauma, Adapun kegiatan yang direalisasikan, meliputi peningkatan taraf hidup bagi penyandang cacat dan eks. kusta berupa pemberian bantuan Jaminan Hidup (Jadup) sebanyak 551 orang dilokasi permukiman eks. Kusta selama 10 bulan di Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Selatan, dan untuk Banda Aceh selama 12 bulan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 18
Bantuan Jaminan Hidup (JADUP) Eks.Kusta

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENERIMA
1	Aceh Tenggara	153 orang
2	Gayo Lues	200 orang
3	Aceh Selatan	185 orang
4	Banda Aceh	13 orang
JUMLAH		551 orang

Pemberian bantuan paket Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi penyandang cacat dan eks.kusta dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 19
Bantuan UEP Eks. Kusta

NO	Kabupaten/Kota	JUMLAH BANTUAN	Jenis Bantuan
1	Aceh Jaya	26 Orang	- Pertanian Cabe
2	Aceh Timur	31 Orang	- Peternakan Kambing
3	Aceh Selatan	35 Orang	- Jualan Dikios, Pertanian Cabe
4	Aceh Pidie Jaya	35 Orang	- Jualan Dikios, Pertanian Cabe
5	Aceh Utara	33 Orang	- Peternakan Kambing
6	Bireuen	35 Orang	- Pertanian Cabe
7	Aceh Singkil	17 Orang	- Pertanian Sawit
8	Aceh Barat Daya	35 Orang	- Pertanian Cabe
9	Aceh Tamiang	25 Orang	- Peternakan Kambing, Jualan Dikios
10	Pidie	31 Orang	- Pertanian Cabe, Peternakan Bebek
			Peternakan Kambing
	JUMLAH	303 Orang	

Dan pemberdayaan para penyandang cacat eks. psikotik berupa pembinaan mental dan pelatihan ketrampilan menjahit dan pertukangan melalui Loka Bina Karya (LBK) dan pemberian bantuan Paket Usaha berupa usaha menjahit sebanyak 14 orang dan pertukangan sebanyak 14 orang.

Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo, Adapun kegiatan yang direalisasikan, meliputi terlaksananya pembinaan dan pelayanan bagi lanjut usia melalui pembinaan dan asuhan panti berupa biaya operasional dan administrasi

panti jompo UPTD Rumoh Seujatera Geunaseh Sayang (RSGS) bagi klien sebanyak 70 orang meliputi penyediaan pakaian, makan dan minuman (SOSH); terlaksananya pembinaan, pendidikan dan ketrampilan bagi para penyandang cacat netra sehingga mereka mampu mandiri di UPTD Rumoh Seujatera Beujroh Meukarya (RSBM) berupa biaya operasional dan administrasi bagi siswa bina netra sebanyak 35 orang berasal dari kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh serta pemberian bantuan paket usaha ekonomi produktif kepada eks. binaan panti sebanyak 10 orang terdiri dari massage 8 orang, kios 1 orang dan ternak 1 orang;

Terlaksananya pembinaan terhadap remaja putus sekolah sehingga mereka mandiri dan mengalami perubahan perilaku yang baik berupa kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan di UPTD Rumoh Seujahtera Jroh Naguna (RSJN) yang terdiri dari tiga angkatan dengan jumlah peserta sebanyak 160 orang siswa/siswi yang berasal dari kabupaten/kota dalam Provinsi Aceh. Adapun pelatihan ketrampilan yang diberikan untuk angkatan pertama jurusan sepeda motor, mobil solar dan las dengan jumlah peserta sebanyak 60 orang, angkatan kedua dengan jurusan menjahit dan jurusan bordir dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang dan angkatan ketiga dengan jurusan sepeda motor, mobil bensin dan las dengan jumlah peserta sebanyak 60 orang.

Program Pembinaan Eks. Penyandang Penyakit Sosial (Eks. Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) , Adapun kegiatan yang direalisasikan, meliputi terbinanya para penyandang tuna sosial yang terdiri dari gelandangan pengemis, eks. napi dan wanita penyandang masalah tuna sosial melalui bimbingan sosial dan mental serta pelatihan keterampilan menjahit, salon, pertukangan kayu dan ketrampilan bengkel sepeda motor di UPTD Rumoh Seujahtera Beujroh Meukarya dengan peserta sebanyak 20 orang berasal dari Kabupaten Aceh Tengah, Aceh Besar dan Aceh Tamiang dan pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Salon, Menjahit, pertukangan kayu, dan bengkel sepeda motor sebanyak 20 orang serta Kegiatan Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS) sebanyak 50 orang; terlaksananya pembinaan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tuna Sosial (PMKS TS) melalui kegiatan bimbingan di Aceh Tamiang dan Aceh Timur masing-masing sebanyak 26 orang, kegiatan KIE Penyandang Masalah Tuna Sosial kerjasama lintas sektor dengan peserta sebanyak 40 orang yang berasal dari Satpol PP Provinsi dan Kabupaten/kota, Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK)

serta sosialisasi Penyandang Masalah Tuna Sosial melalui televisi dan pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 20
Bantuan UEP Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tuna Sosial
(PMKS TS)

NO	PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)/ LOKASI / JENIS BANTUAN	JUMLAH PENERIMA
1	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasarakatan (BWBLP) (Lokasi Provinsi)	
	- Kios	11 orang
	- Membuat Kue	10 orang
	- Jualan Buah	1 orang
	- Doorsmir	2 orang
	- Nelayan	3 orang
	- Pertanian	3 orang
	JUMLAH	30 orang
2	Kelompok Minoritas (Banda Aceh)	
	- Salon	10 orang
	- Rias Pengantin	10 orang
	JUMLAH	20 orang
3	Pemulung (Lokasi Provinsi)	
	- Bengkel	2 orang
	- Perabot	1 orang
	- Kios	8 orang
	- Becak	4 orang
	- Membuat Kue	14 orang
	- Pertanian	1 orang
	JUMLAH	30 orang
4	Wanita Penyandang Masalah Tuna Sosial (WPMTS)	
	Kota Langsa	
	- Menjahit	2 orang
	- Membuat Kue	12 orang
	- Kios	4 orang

JUMLAH

22 orang

Peningkatan produktifitas berusaha bagi gelandangan dan pengemis melalui bimbingan pelatihan dan ketrampilan di Kabupaten Pidie, Kabupaten Bireuen dan Kota Langsa dengan peserta masing-masing kabupaten/kota sebanyak 18 orang dan pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 21
Bantuan UEP Gelandangan Dan Pengemis (GEPENG)

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH BANTUAN	JENIS BANTUAN
1	Pidie	18 orang	- Jualan Sirih, Menjahit, Membuat Kue, Tambal Ban, Jualan Kios, Ternak Kambing, Peternakan Ayam dan Ternak Bebek
2	Bireuen	18 orang	- Menjahit, Jualan Kios, Ternak Bebek, Ternak Kambing, Membuat Tilam dan Pertanian Cabe
3	Langsa	18 orang	- Ternak Bebek, Menjahit, Jualan Baju Keliling Jualan Pemulung, Ternak Kambing, Jualan Lontong, Jualan Dikios dan Membuat Kue

Serta razia Gepeng di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar yang melibatkan jejaring kerja dari Dinas Sosial Kabupaten Kota, Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dan dari Kepolisian; dan terlaksananya pembinaan mental agama, sosial dan terlatihnya ketrampilanusaha bagi Penyandang HIV/Aids sebanyak 16 orang dan pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) berupa ternak kambing, pemberian bantuan stimulan untuk lembaga HIV/Aids serta pemberian bantuan asistensi bagi orang dengan HIV/Aids (ODHA) sebesar Rp. 200.000,- per bulan selama satu tahun sebanyak 15 orang.

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, Adapun kegiatan yang direalisasikan, meliputi terlaksananya kegiatan penguatan ketahanan sosial masyarakat pedesaan melalui bimbingan tehnik dengan peserta sebanyak 36 orang di Kota Sabang dan pemberian bantuan berupa perlengkapan prasmanan untuk 3 desa; terlatih dan terbinanya para Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan melalui Pelatihan Dasar Pekerja Sosial bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial

Kecamatan (TKSK) sebanyak 50 orang di Banda Aceh dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dengan peserta sebanyak 50 orang di Banda Aceh;

Terbentuknya Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PUSPELKESSOS) sebagai wadah potensi kesejahteraan sosial dimana kegiatannya meliputi Launching Puspelkessos di 15 Kabupaten/Kota yaitu Pidie Jaya, Lhokseumawe, Langsa, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Subulussalam, Aceh Singkil, Simeulue dan Aceh Besar dengan peserta sebanyak 400 orang masing-masing kabupaten/kota, Pengukuhan Puspelkessos di 7 Kabupaten/Kota yaitu Pidie, Aceh Utara, Bireuen, Aceh Timur, Bener Meriah, Aceh Tengah dan Banda Aceh dengan peserta sebanyak 400 orang masing-masing kabupaten/kota dan Pembentukan Puspelkessos di 11 Kabupaten/Kota yaitu Aceh Besar, Banda Aceh, Aceh Jaya, Sabang, Pidie Jaya, Lhokseumawe, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Langsa, Aceh Tamiang, Subulussalam dan Simeulue; terlatihnya ketrampilan bagi Taruna Siaga Bencana (TAGANA) berupa pelatihan pemantapan dalam penanggulangan bencana di Ladong Aceh Besar sebanyak dua angkatan dengan peserta sebanyak 50 orang per angkatan serta kegiatan Hut dan Bhakti Sosial Tagana tingkat nasional di Banda Aceh yang diikuti seluruh provinsi di Indonesia sebanyak 800 orang;

Terlaksananya kegiatan penguatan kapasitas Karang Taruna melalui pelatihan bagi pengurus karang taruna di Banda Aceh dengan peserta sebanyak 60 orang dari 23 kabupaten/kota serta pemberian bantuan berupa UEP doorsmer sepeda motor untuk 20 Karang Taruna di Bener Meriah, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa, Aceh Tengah dan Banda Aceh, bantuan kursi plastik sebanyak 20 untuk Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) di Aceh Selatan, Nagan Raya, Bireuen, Subulussalam, Aceh Besar dan Banda Aceh serta bantuan sekretariat sebanyak 20 di Sabang, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa, Aceh Tengah, Aceh Besar dan Banda Aceh dan kegiatan Bulan Bhakti Karang Taruna di Bireuen berupa bedah rumah sebanyak 5 rumah dhuafa;

Terlaksananya penyuluhan sosial berupa penyebaran informasi program pembangunan bidang kesejahteraan sosial dalam bentuk hiburan untuk masyarakat di Kabupaten Aceh Selatan, Nagan Raya dan Pidie; dan terbinanya Organisasi Sosial dalam kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) melalui pelatihan penguatan kapasitas pengurus Organisasi Sosial (Orsos) luar panti dilaksanakan di Banda Aceh sebanyak 25 orang dan pemberian bantuan berupa laptop, kegiatan

Rapat Koordinasi Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BK3S) di Banda Aceh dengan peserta sebanyak 30 orang serta kegiatan pembinaan dan pengembangan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) di Aceh Tamiang dengan jumlah peserta sebanyak 80 orang dan pemberian bantuan berupa perlengkapan prasmanan.

Capaian indikator sebagai tolak ukur pencapaian target kinerja urusan sosial tahun 2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

DINAS SOSIAL

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	Keterangan
1	Jumlah Sarana Sosial (Panti Asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi)	189 unit	189 unit	
2	Jumlah PMKS	829.552 org	42.926 org	
3	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	829.552 org	42.926 org	

Jumlah sarana sosial yang terdiri dari panti asuhan, panti jompo dan panti cacat pada tahun 2015 mengalami penurunan sebanyak 61 panti dibandingkan tahun 2014 jumlah sarana sosial sebanyak 250 panti. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada tahun 2015 sebanyak 829.552 orang, sedang penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial pada tahun 2015 sebanyak 42.956 orang.

3. Permasalahan dan Solusi

Secara umum tidak ada kendala yang berarti dalam semua pelaksanaan program dan kegiatan APBA Dinas Sosial Aceh pada tahun 2015.

BAB V
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

A. Tugas Pembantuan yang Diterima

1. Dasar Hukum

DIPA-027.03.4.069143/2015 tanggal 04-11-2014

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Kementerian Sosial Republik Indonesia

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan

Dinas Sosial Aceh

4. Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya

Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan. Tujuan kegiatan ini untuk memberdayakan masyarakat/komunitas adat terpencil berupa pemberian bantuan Jaminan Hidup (Jadup) untuk warga KAT di Desa Buket Seuleumak Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur sebanyak 10 KK dan bantuan peralatan rumah tangga untuk 10 KK, serta pemberian Jadup untuk warga KAT di Desa Buket Makmur Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur sebanyak 23 KK dan bantuan peralatan rumah tangga sebanyak 23 KK.

5. Sumber dan Jumlah Anggaran

No	Belanja/Kegiatan	Anggaran(Rp)	Realisasi		
			Keuangan (RP)	(%)	Fisik(%)
1	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	123.450.000,-	103.925.600,-	84,18	100

6. Permasalahan dan Solusi

Pada Tahun 2015 Kegiatan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) telah dilaksanakan semua dengan baik sehingga dapat terselesaikan tanpa mengalami hambatan dan kendala.

B. Tugas Pembantuan yang Diberikan

(tidak ada)

BAB VI

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerjasama Antar Daerah

(tidak ada)

B. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga

(tidak ada)

C. Koodinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah

(tidak ada)

D. Pembinaan Batas Wilayah

(tidak ada)

E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

1. Bencana yang terjadi dan Penanggulangan Bencana

Bencana yang terjadi di Aceh, diantaranya: Bencana Alam dan Bencana Sosial.

- a. Bencana Alam, diantaranya: Banjir, Banjir Bandang, Gempa Bumi, Tsunami, Tanah Longsor dan Meletus Gunung Berapi.
- b. Bencana Sosial, diantaranya: Aliran Sesat, Sengketa Tanah dan Konflik Politik

Penanggulangan Bencana di Aceh, diantaranya:

a. Bencana Alam:

1) Pra bencana

- Melakukan kegiatan pencegahan dan mitigasi bencana pada Daerah rawan bencana.
- Pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB) pada Lokasi rawan bencana. Adapun Kabupaten yang telah dibentuk KSB, diantaranya: Kabupaten Singkil, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Aceh Barat, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, dan Kota Langsa.
- Perekrutan Taruna Siaga Bencana (TAGANA), dimana calon TAGANA direkrut pada setiap Kabupaten/Kota yang berjumlah 60 orang per kegiatan. Pelatihan TAGANA yang telah dilaksanakan diantaranya di Kota Sabang dan Aceh Besar pada tahun 2015.

- Pelatihan *Shelter*. Pelatihan ini dilakukan bertujuan untuk mengembangkan kemampuan petugas pada lapangan untuk

mengasesmen korban bencana. Pelatihan ini dilakukan di Sabang pada tahun 2015.

- Pelatihan Psikososial. Pelatihan ini dilakukan bertujuan untuk membekali keterampilan petugas psikososial dalam memulihkan psikologis sosial yang dialami oleh korban bencana yang telah dilakukan di Banda Aceh pada tahun 2015.

2) Saat terjadi bencana

Menyalurkan bantuan masa panik kepada Korban bencana seperti: Lauk pauk, Sardencis, Air Mineral, Baju Daster, Pempers, Pembalut Wanita, Kecap, Saus, Indomie, Sarung, dan Baju. Di samping itu, mendirikan Tenda Pengungsi, membuka Posko Dapur Umum pada Lokasi bencana, mengerahkan Personil Taruna Siaga Bencana (TAGANA), dan melakukan identifikasi kebutuhan dasar.

3) Pasca bencana

Melakukan pendampingan sosial dan psikososial bagi Korban bencana.

b. Bencana Sosial:

1) Pra bencana

Pemetaan Bencana Sosial pada Daerah rawan bencana sosial, diantaranya: Singkil, Subulussalam, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Meulaboh, Bireun, Aceh Timur, Aceh Tengah, Bireuen, dan Simeulu. Di samping itu, Mempererat hubungan masyarakat dengan pemerintahan melalui program keserasian sosial.

2) Saat terjadi bencana

Menyalurkan bantuan masa panik kepada Korban bencana seperti: Lauk pauk, Sardencis, Air Mineral, Baju Daster, Pempers, Pembalut Wanita, Kecap, Saus, Indomie, Sarung, dan Baju. Di samping itu, mendirikan Tenda Pengungsi, membuka Posko Dapur Umum pada Lokasi bencana, mengerahkan Personil Taruna Siaga Bencana (TAGANA), dan melakukan identifikasi kebutuhan dasar.

3) Pasca bencana

Melakukan pendampingan sosial dan psikososial bagi korban bencana.

2. Status Bencana (Nasional, Regional/Provinsi atau Lokal/Kabupaten/Kota)

Adapun status bencana di Indonesia termasuk pada status siaga dikarenakan Negara Indonesia terletak pada lintang bujur khatulistiwa. Aceh berstatus darurat bencana karena di beberapa kabupaten/kota di Aceh kerap terjadi bencana banjir dan tanah longsor dimana dalam setiap tahunnya sangat rentan terjadi. Bencana banjir terjadi di wilayah Barat di Aceh sehingga menimbulkan korban jiwa dan rusaknya rumah warga serta bangunan. Disamping itu, tanah longsor sering terjadi di Wilayah Tengah. Status keadaan darurat bencana di Aceh sangat mengganggu dan mengancam kehidupan masyarakat serta jatuhnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Keadaan darurat bencana di Aceh dipicu oleh faktor alam, yaitu: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir dan tanah longsor. Faktor Non Alam, yaitu: Gagal teknologi, Gagal modernisasi, Epidermis dan Wabah penyakit. Faktor Manusia, yaitu: Konflik sosial dan Teror.

3. Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber anggaran penanggulangan bencana di Aceh, yaitu APBN dan APBA. Jumlah anggaran APBN melalui Program Perlindungan dan Jaminan Sosial sebesar Rp. 6.298.048.000. Jumlah anggaran APBA sebesar Rp. 50.757.398.623,-

4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana

Dinas Sosial Aceh melalui anggaran APBN dan APBA melakukan kegiatan pencegahan dan kegiatan mitigasi bencana pada daerah rawan bencana. Kegiatan pencegahan yang dimaksud, diantaranya: Pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB), Pelatihan Tagana Dasar, dan pemetaan daerah rawan bencana. Di samping itu, memperkuat sistem birokrasi pemerintah Kabupaten/Kota dengan Dinas Sosial Aceh sebagai upaya untuk mempermudah dalam penyaluran bantuan bagi korban bencana.

5. Potensi Bencana yang Diperkirakan Terjadi

Bencana yang kerap terjadi di Aceh adalah Banjir dan Banjir bandang serta Tanah Longsor. Bencana tersebut terjadi akibat rusaknya ekologis karena

ulah manusia, seperti konvensi hutan maupun eksploitasi yang tidak ramah lingkungan. Bencana yang sering terjadi pada Kabupaten/Kota di Aceh, diantaranya: Kabupaten Singkil, Subulussalam, Aceh Selatan, Aceh Barat, Bireuen, Pidie dan Pidie Jaya, Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Tengah, dan Kota Langsa.

F. Pengelolaan Kawasan Khusus

(tidak ada)

G. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

(tidak ada)

BAB VI

PENUTUP

Permasalahan sosial di Aceh sangat beragam dan tergolong besar jumlahnya, dengan kondisi tersebut menuntut penanganan permasalahan kesejahteraan sosial yang terencana secara baik dengan menggunakan metode dan sumber daya manusia yang memiliki potensi di bidang pembangunan kesejahteraan sosial. Permasalahan sosial yang ada seperti Gelandangan, Pengemis (GEPENG), Anak Jalanan, Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), pengungsi dan tingginya angka pengangguran.

Untuk itu perlu adanya peningkatan jangkauan pelayanan dan pemantapan kualitas pelayanan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah maupun masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial yang telah dicapai perlu ditingkatkan, dengan meningkatkan efisiensi dan disiplin kerja seluruh jajaran serta meningkatkan fungsi pengawasan yang semakin efektif.

Permasalahan sosial cenderung meningkat baik kuantitas maupun kualitas menuntut pelayanan yang semakin profesional. Hal tersebut perlu adanya peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada semua lini bidang pembangunan kesejahteraan sosial melalui sistem pembinaan dan mengikutsertakan dalam berbagai pelatihan kejuruan, fungsional dan administratif. Melalui sumber dana APBN yang dialokasikan pada Kementerian Sosial RI, khususnya pada Balai Besar Pendidikan Pelatihan Kesejahteraan Sosial maupun melalui sumber dana APBA yang dialokasikan pada Badan Diklat Provinsi Aceh, diharapkan dapat melatih tenaga-tenaga pekerja sosial yang ada di provinsi maupun kabupaten/kota, bahkan kecamatan.

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) juga berkaitan dengan Arah Kebijakan yang harus dilalui oleh Dinas Sosial Aceh yaitu Peningkatan kualitas dan kuantitas jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial di Provinsi Aceh, memanfaatkan dan mengembangkan potensi dan sumber-sumber kesejahteraan sosial, meningkatkan kapasitas lembaga atau organisasi sosial dalam melaksanakan kegiatan usaha kesejahteraan sosial.

Untuk keakuratan data permasalahan dan usaha penanganannya, diperlukan adanya rintisan kearah keterpaduan koordinasi antar Dinas Sosial Aceh dengan instansi

sosial kabupaten/Kota bahkan pihak kecamatan, dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial atau usaha-usaha kesejahteraan sosial di seluruh wilayah Aceh.